



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Pembangunan Tanggul Pesisir Selesai di 2025

Proyek tanggul fase A bagian dari Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara akan dilanjutkan dan selesai pada 2025. Nelayan meminta agar kepentingannya dilindungi.

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta memastikan pembangunan tanggul pantai fase A, bagian dari program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development, tidak memerlukan pembebasan lahan. Untuk pembangunan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI sudah menyusun trase tanggul pantai itu.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Heru Hermawan-to, Rabu (4/1/2023), di Balai Kota DKI, menjelaskan, Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) merupakan program pemerintah pusat. Lokasinya sebagian ada di wilayah Jakarta.

Untuk bisa membangun, Dinas Citata membuat trase tanggul pantai. "Karena tanggul pantai relatif tidak ada pembebasan lahan, kami membuat trasenya dan kemudian ditetapkan melalui surat keputusan gubernur," ujar Heru.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Yusmada Faizal juga memastikan, karena pembangunan tanggul pantai ada di area pantai, maka tidak ada pembebasan lahan. Untuk kelanjutan pembangunan tanggul pantai fase A NCICD di DKI, akan dilakukan di area sepanjang 11 kilometer. Pengerjaan dibagi dalam empat kluster, yaitu Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat, dan Kali Blencong.

Pembangunan akan menggunakan anggaran tahun jamak atau *multiyears* 2023-2025. Adapun total anggaran yang diperlukan Rp 1,385 triliun. "Untuk sementara ini yang sudah teranggarkan Rp 595 miliar untuk pengerjaan kluster Ancol Barat, Muara Angke, dan sebagian Kali Blencong," kata Yusmada.

Ruang publik

Secara terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta mesti bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional terkait tanggul pantai. Ia menjelaskan, ketika tanggul pantai terbangun, ada lahan yang timbul dan itu milik Pemprov DKI Jakarta.

"Itu harus cepat kami sertifikasikan untuk pengamanan aset," kata Heru Budi.

Kemudian, di atas lahan yang timbul karena pembangunan tanggul pantai, Pemprov DKI akan membangun ruang publik dilengkapi berbagai fasilitas.

Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menjelaskan, pembangunan ruang publik itu akan dilakukan di area atau lahan dekat pembangunan tanggul pantai di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Area itu sesuai panjang tanggul pantai yang terbangun sepanjang 3,2 kilometer.

"Sesuai dengan tata letak (*layout*) rencana pembangunan ruang ketiga, terdapat sejumlah sarana umum, antara lain, taman, lapangan futsal, lapangan voli, taman bermain anak, hingga destinasi wisata," katanya.

Tahap berikutnya akan dilakukan penataan kawasan yang akan menjadi sarana umum yang dapat dinikmati masyarakat. Ali Maulana mengimbau kepada masyarakat sekitar tanggul pantai untuk tidak memanfaatkan kawasan tanggul pantai untuk kepentingan pribadi.

Untuk itu, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta akan segera memasang pagar dan plang terhadap tanah timbul di sekitar tanggul pantai tersebut sehingga tidak dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi.

Secara terpisah, Kepala Satuan Kerja NCICD dari Kementerian PUPR Ferdinanto menerangkan, prinsip pemba-

ngunan NCICD tidak hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir semata, tetapi juga turut memperbaiki kondisi lingkungannya dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

Perhatikan nelayan

Sementara itu, para nelayan mengharapkan pembangunan tanggul di wilayah pesisir DKI Jakarta itu tetap melindungi mata pencarian mereka yang bergantung pada hasil laut.

Dari proyek tanggul kewenangan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 19,1 km, sebagian besar masih belum terealisasi karena harus melewati permukiman dan aktivitas nelayan. Sebagian kawasan tersebut, antara lain, kluster Muara Angke (kurang 3,4 km), kluster Pantai Mutiara (kurang 1 km), kluster Sunda Kelapa (kurang 4,8 km), dan kluster Kali Blencong (kurang 1,7 km).

Salah satu permukiman nelayan itu berada di kawasan RT 006 RW 022, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau biasa disebut Kampung Kerang Hijau. Sekitar 200 keluarga nelayan tinggal di sana, baik sebagai nelayan penangkap, nelayan pengelola, maupun nelayan pemasaran.

Dodo (42), nelayan kerang hijau, berharap pemerintah tetap memperhitungkan masyarakat sekitar yang bergantung kepada hasil laut, seperti kerang hijau. "Tidak masalah kalau mau bikin tanggul asal nanti dibuatkan pintu masuk kapal sehingga mudah bongkar muatnya. Semoga pemerintah melibatkan masyarakat untuk mencari jalan tengahnya," lanjut Dodo.

Ketua RT 006 RW 022, Kelurahan Pluit, Warya mengatakan, selain mengharapkan akses pintu masuk kapal, warganya juga ingin tetap tinggal di dekat pesisir laut. Sebagai nelayan, lanjut Warya, warganya ingin bisa memantau langsung kondisi kapalnya. (HLN/Z08)